

## TANTANGAN MENGHADAPI MASALAH ETIKA BERDASARKAN PANCASILA

Muhammad Malik Fahrozy<sup>1</sup>, Skolastika Reva<sup>2</sup>, Vera Verlya Fahmi<sup>3</sup>, Zanetha<sup>4</sup>, Marsya Esa Nur Islami<sup>5</sup>, Melly Sabila<sup>6</sup>, Suryaningi Suryaningi<sup>7</sup>

Email: [iniariss03@students.unnes.ac.id](mailto:iniariss03@students.unnes.ac.id), [dinikir52@students.unnes.ac.id](mailto:dinikir52@students.unnes.ac.id), [karinasalsabila12@students.unnes.ac.id](mailto:karinasalsabila12@students.unnes.ac.id), [sh3rlin@students.unnes.ac.id](mailto:sh3rlin@students.unnes.ac.id)

Universitas Negeri Semarang

**Abstrack**

*Ethical fragility challenges the continuity of Pancasila values in the context of Indonesia's socio-political development in 2025. Ethical degradation that undermines the joints of the nation's life is discussed in this article. It also emphasizes how important it is to work together between the government, society, educational institutions, and the media to address this issue. Through interviews and perspectives from academics and national figures, it discusses how Pancasila as the crystallization of local wisdom is still being tested in the context of digital culture and globalization. The solutions include the establishment of an Ethics Court and the strategic role of Generation Z in actualizing the values of Pancasila. In this research, it is found that consistency in the application of ethics based on Pancasila is the key to maintaining the integrity of the nation facing problems at home and abroad.*

**Keywords:** *Pancasila, Ethical Fragility, Generation Z*

**Abstrak**

Kerapuhan etika menantang kelangsungan nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkembangan sosial-politik Indonesia pada tahun 2025. Degradasi etika yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dibahas dalam artikel ini. Ini juga menekankan betapa pentingnya bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan media untuk mengatasi masalah ini. Melalui wawancara dan perspektif para akademisi dan tokoh nasional, dibahas bagaimana Pancasila sebagai kristalisasi kearifan lokal masih diuji dalam konteks budaya digital dan globalisasi. Solusi tersebut mencakup pembentukan Mahkamah Etika dan peran strategis Generasi Z dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa konsistensi dalam penerapan etika berlandaskan Pancasila adalah kunci untuk

**Article History**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menjaga keutuhan bangsa menghadapi masalah di dalam negeri dan di luar negeri.

**Kata kunci:** Pancasila, Kerapuhan Etika, Generasi Z

## PENDAHULUAN

Dinamika sosial-politik Indonesia tahun 2025, muncul tantangan serius yang mengancam keberlangsungan nilai-nilai Pancasila: kerapuhan etika. Meski bukan fenomena baru, degradasi etika kini semakin nyata dan kompleks, menjelma menjadi ancaman laten yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penyelesaian terhadap kerapuhan etika ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga media. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa, sementara pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan hukum dan menindak praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila dianggap sebagai sebuah kerangka moral yang berdasarkan pada lima prinsip. Sebagai kerangka moral, Pancasila memberikan arahan bagi individu dalam bersikap kepada orang lain dan kepada masyarakat secara umum. (Priwardani et al., 2023)

Peran media massa juga sangat krusial, bukan hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membentuk opini publik yang mendukung nilai-nilai moral dan etika yang selaras dengan Pancasila. Melalui pemberitaan yang objektif dan berintegritas, media dapat membantu memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga etika dalam setiap tindakan politik, ekonomi, dan sosial. Media komunikasi memainkan fungsi yang sangat krusial dalam membangun pandangan masyarakat. Di zaman digital ini, platform media sosial menjadi sarana bagi opini publik yang semakin luas dan memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk menciptakan berita serta membentuk pandangan publik melalui saluran media sosial. Media komunikasi juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. (Zahra et al., 2023).

Dalam jangka panjang, jika kesadaran akan pentingnya etika ini dapat diterapkan secara konsisten dalam semua lapisan masyarakat, maka Pancasila sebagai dasar negara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur akan mampu bertahan, meski dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Keberhasilan dalam memperbaiki kerapuhan etika ini akan menjadi cermin kematangan demokrasi Indonesia yang lebih solid, adil, dan berkeadilan. Dengan berfungsi sebagai ideologi nasional Indonesia, Pancasila membentuk landasan yang kokoh untuk jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini dapat berfungsi sebagai filter di era globalisasi, membantu rakyat Indonesia menerima pengaruh asing tanpa kehilangan identitas dan sifat nasionalnya. (Adilla et al., n.d.).

## METODE PENELITIAN

*Library research* merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. *Library research* juga sering disebut dengan kajian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan cara pengumpulan data pustaka dengan mencari literatur-literatur yang membahas dan menggunakan metode studi kasus dalam penelitiannya. (Wibowo, 2019) Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Fitriana, 2020) Dengan metode studi pustaka ini kelebihanannya ialah memudahkan peneliti untuk menemukan data atau bahan yang sedang dicari, peneliti dengan metode pustaka cenderung dapat meningkatkan fokus dengan tersedianya lingkungan yang cukup, penelitian dengan metode ini juga bisa membantu seorang peneliti untuk menghindari gangguan yang berpotensi muncul dibanding metode penelitian lain. (Ismayani, 2019).

## PEMBAHASAN

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak hanya sekadar simbol, melainkan telah berperan sebagai perekat bangsa Indonesia yang majemuk sejak awal kemerdekaan hingga kini. Dalam wawancara eksklusif, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bung Karno, Franky Roring, Ph.D., menegaskan bahwa esensi Pancasila justru terletak pada kemampuannya mengakomodasi perbedaan tanpa menghapus identitas asli tiap individu atau kelompok. Lebih jauh, akademisi yang telah meneliti dinamika sosial-politik Indonesia selama 15 tahun ini menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya bukanlah konsep yang diimpor dari luar, melainkan kristalisasi dari kearifan lokal yang telah hidup ribuan tahun dalam masyarakat Nusantara. Prinsip gotong royong, toleransi beragama, hingga musyawarah mufakat - semuanya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang dirumuskan Bung Karno dan para pendiri bangsa. (Rizqullah & Najicha, 2022).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof. Dr. Mahfud MD, dengan tegas menyatakan bahwa krisis etika bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan sistemik yang telah mengakar sejak era Orde Baru dan terus berevolusi hingga sekarang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini membeberkan bagaimana praktik-praktik koruptif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya merupakan puncak gunung es dari masalah yang lebih mendasar, yakni erosi nilai-nilai luhur bangsa. Yang lebih mengkhawatirkan, degradasi moral tersebut secara langsung telah melumpuhkan implementasi Trisakti—konsep visioner Bung Karno tentang kedaulatan politik yang kini direduksi menjadi transaksi kekuasaan, kemandirian ekonomi yang tergadaikan oleh utang dan impor, serta kepribadian budaya yang tergerus arus globalisasi. "Pancasila sebagai kompas etika bangsa justru dijadikan alat retorika, sementara praktiknya bertolak belakang," tandasnya sambil menekankan perlunya reformasi sistemik di semua lini pemerintahan dan masyarakat. (Elfara Alviolita & Fitria, n.d.)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut menyoroti pentingnya penegakan etika dalam penyelenggaraan negara. Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifiantoi, mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi untuk memastikan bahwa para pejabat negara bertindak dengan integritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Menurutnya, lembaga ini bisa menjadi wadah pengawasan moral bagi para pemimpin, dan melengkapi lembaga hukum (Shomad, 2016). Gagasan ini muncul dari keprihatinan bahwa selama ini pelanggaran etika seringkali lolos dari jerat hukum karena belum memenuhi unsur pidana,

padahal telah merusak sendi-sendi moral pemerintahan. Tonny mencontohkan kasus pejabat yang menggunakan fasilitas negara secara berlebihan atau melakukan tindakan diskriminatif yang sulit dijerat KUHP tetapi jelas bertentangan dengan Sila Keadilan Sosial.

## KESIMPULAN

Kerapuhan etika adalah musuh lama yang kini menjelma menjadi tantangan besar di tahun 2025. Jika tidak segera ditangani secara serius, ia berpotensi melemahkan sendi-sendi negara dan merusak integritas bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus terus diperjuangkan tidak hanya lewat simbol dan wacana, tetapi melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya semua elemen bangsa, dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, bergerak bersama menegakkan kembali nilai-nilai etis dan moral sebagai fondasi Indonesia yang berkeadilan, berdaulat, dan berbudaya. Kerapuhan etika yang semakin meluas menuntut respons kolektif dari seluruh komponen masyarakat. Jika etika kembali dijadikan pegangan dalam setiap aspek kehidupan, maka nilai-nilai Pancasila dapat kembali dijadikan kompas moral bangsa. Pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dan menindak praktik-praktik yang merusak moralitas publik. Sementara itu, generasi muda, khususnya Generasi Z, harus diberikan ruang untuk menyerap dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital ini. Dengan demikian, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan domestik, serta tetap menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar negara sejak awal kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia, 42.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### ARTIKEL JURNAL

Adilla, A., Amanda, D., Warohmah, S., Rahma Sari, S., Marsyalina, E. S., Sundari, R. I., Ramadina, C. S., & Sihaloho, O. A. (n.d.). *Relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi di kalangan mahasiswa Pendidikan Biologi*

*angkatan 2023 UNIMED* [The relevance of Pancasila in facing the challenges of globalization and modernization among Biology Education students class of 2023 UNIMED]. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.  
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

Alviolita, D. E., & Fitria, N. (2024). Pancasila Dan Etika Profesi: Penerapan Nilai-Nilai Moral Dalam Kehidupan. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 44-55.

Fitriana, D. (2020). Hakikat Dasar Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*

Ismayani, A. (2019). Metodologi penelitian. Syiah Kuala University Press.

Mihit, Y. (2023). Dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila di era globalisasi: Tinjauan literatur. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), 357-366. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/issue/view/8>

Priwardani, A. N., Auriellia, A., Monica, D., Nur, M., & Yaasiin, F. (2023). *PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA*. 2.

Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). PEGIMPLEMENTASIAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Wibowo, A. (2019). Kampanye Moderasi Beragama di Facebook: Bentuk dan Strategi Pesan. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 85-103.

Shomad, B. A. (2016). Etika pemerintahan: Kontribusi tafsir *Fī zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb. *Jurnal Theologia*, 22(2). <https://doi.org/10.21580/teo.2011.22.2.611>

Zahra, Y. F., Cendikia, H. F., Molfi, I. I., & Murdiana, V. (2023). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial MEDIA MASSA SEBAGAI PEMBENTUKAN PERSEPSI PUBLIK*. *Number*, 2, 2024-2055.